
Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bidang Jasa

Pristiana Widyastuti

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

pristia.widya@gmail.com

Abstract

This study aimed to analyze the application of Financial Accounting Standards For Entities Without Public Accountability (SAK-ETAP) financial records on Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in the field of services. SAK-ETAP is the financial standards that facilitate SMEs in preparing and presenting financial statements. Financial reports used by SMEs as information to investors and creditors to obtain business funding. The information can also be used as a reference for business tax reporting. This research is a descriptive study using a qualitative approach to SMEs in the field of services namely Bimbingan Belajar Disciple Course (Dis-Co). The study was conducted through qualitative data analysis developed by Milles and Huberman namely data reduction, data models and conclusions or verification. Data is collected by observation and in-depth interviews to stakeholders. The results showed that financial records are still done simply due to lack of knowledge of owner for the purpose, benefits and stage of preparation of financial statements based SAK-ETAP. Based on the research results, there should be counseling the application of financial report based on SAK-ETAP for SMEs.

Keyword: Accounting, SAK-ETAP, Financial Report, SMEs, Services

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pencatatan keuangan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di bidang jasa. SAK-ETAP adalah standar keuangan yang mempermudah UMKM dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan oleh pengusaha UMKM sebagai informasi kepada investor dan kreditur untuk mendapatkan pendanaan usaha. Informasi tersebut juga dapat digunakan sebagai acuan pelaporan pajak usaha. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif pada UMKM di bidang jasa Sanggar Belajar *Disciple Course* (Dis-Co). Penelitian dilakukan melalui analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman yakni reduksi data, model data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam kepada *stakeholder*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan keuangan masih dilakukan secara sederhana yang disebabkan kurangnya pengetahuan pengusaha terhadap tujuan, manfaat dan tahapan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-ETAP. Berdasarkan hasil penelitian, perlu ada penyuluhan penerapan laporan keuangan berbasis SAK-ETAP bagi para pelaku usaha sektor UMKM.

Kata kunci: Akuntansi, SAK-ETAP, laporan keuangan, UMKM, Jasa

Pendahuluan

Pencatatan laporan keuangan merupakan aspek penting dalam suatu kegiatan usaha. Laporan keuangan digunakan sebagai sajian informasi keuangan yang digunakan baik bagi pihak internal maupun eksternal kegiatan usaha tersebut. Bagi pihak internal, laporan keuangan digunakan oleh pihak manajemen dan pemilik usaha untuk mengetahui posisi keuangannya sehingga dapat diambil langkah-langkah strategis dalam mengelola keuangannya. Pihak eksternal menggunakan laporan keuangan sebagai bahan analisis dalam pemberian kredit oleh kreditur maupun pendanaan oleh investor. Menurut Harahap (2007), laporan keuangan adalah output dan hasil akhir dari proses akuntansi yang menjadi informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Di samping itu, laporan keuangan juga digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atau *accountability* perusahaan.

Pencatatan laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Bagi usaha yang memiliki tanggung jawab publik secara signifikan dan/atau lintas negara, maka laporan keuangan harus merujuk pada Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum). Sedangkan, bagi usaha yang memiliki tanggung jawab publik dengan signifikansi rendah maka laporan keuangan dapat merujuk pada Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). ETAP merupakan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal, antara lain kreditur atau investor. Pencatatan laporan keuangan berbasis SAK-ETAP menjadikan suatu usaha memiliki profesionalisme dalam pencatatan keuangan. Selain itu, pencatatan berbasis SAK-ETAP akan dijadikan sebagai acuan pembuatan SPT bagi Otoritas Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI) kepada pemilik usaha sebagai wajib pajak. Pengguna SAK-ETAP tidak tergolong menguasai aset dalam kapasitas sekelompok besar masyarakat seperti Bank, Asuransi, Pialang, Dana Pensiun, Reksa Dana dan Bank Investasi. Dapat disimpulkan bahwa pengguna SAK-ETAP merupakan kegiatan usaha yang berskala kecil dan menengah seperti UMKM.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang dapat menjadi alternatif solusi yang strategis bagi pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Sesuai dengan UU No.20, Tahun 2008 tentang UMKM, UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki. UMKM memiliki peranan penting bagi pembangunan nasional dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Seperti dilansir dari media bisnis Tempo (www.temppp.co.id) pada November 2015, Menteri Perekonomian Indonesia, Darmin Nasution mengungkapkan bahwa UMKM menjadi salah satu jurus penangkal krisis pemerintah Indonesia melalui penguatan modal dalam negeri. Keberadaan UMKM menjadi alternatif di

tengah krisis finansial yang dialami perusahaan- perusahaan besar. Berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2015, jumlah UMKM di Indonesia hingga akhir 2013 tercatat sebanyak 57.895.721 atau naik 2,41% dibanding tahun 2012.

Melihat perkembangan UMKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini belum disertai akan kesadaran pemilik usaha dalam melakukan pencatatan laporan keuangan. UMKM belum memahami akan pentingnya pencatatan laporan keuangan bagi kegiatan bisnisnya. Pencatatan laporan keuangan di sektor UMKM dilakukan secara sederhana, sehingga karakteristik laporan keuangan yang belum berstandar SAK-ETAP dianggap belum dijalankan dengan profesional, hal ini mengakibatkan sulitnya UMKM memperoleh sumber dana/modal.

Disciple Course (Dis-Co) adalah salah satu usaha kecil yang bergerak di bidang jasa sanggar belajar bagi siswa SD, SMP dan SMA di samping Sanggar pendidikan formal di sekolah. Jasa sanggar belajar ini didirikan sejak tahun 2003 dan sudah memiliki SK pendirian oleh ijin Dinas Pendidikan Kota Kediri pada awal tahun 2015. Rata-rata jumlah siswa yang bergabung dengan Dis-Co setiap tahun adalah 200 siswa. Pendapatan dari jasa sanggar belajar Dis-Co dapat mencapai 200 juta rupiah per tahun, sedangkan jumlah guru yang dipekerjakan adalah 8 orang sebagai pengajar tetap, sehingga jenis kegiatan usaha ini dapat dikategorikan sebagai usaha kecil. Seiring perkembangan Sanggar belajar Dis-Co yang diawali oleh pemilik usaha yang mengajar perorangan dengan jumlah siswa 15 hingga 20 orang hingga kini, fasilitas kelas yang dimiliki Dis-Co masih kalah saing dengan Sanggar belajar sejenis lainnya yang memiliki modal besar. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Dis-Co, "...dibandingkan sanggar belajar sejenis yang modalnya besar, kami kalah di bidang fasilitas kelas yang lebih representatif".

Permasalahan permodalan seringkali dirasakan oleh pemilik UMKM. Salah satu usaha untuk mendapatkan modal adalah dengan mengajukan kredit perbankan. Hal tersebut juga didukung oleh pemerintah Indonesia terkait pembiayaan UMKM yakni melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, UMKM yang mendapatkan KUR masih dirasa sulit. Menurut Baas dan Schrooten (2006), penyaluran KUR yang masih sulit disebabkan karena bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR telalu berhati-hati dalam penyaluran kredit, peyaluran kredit memerlukan informasi yang memadai terkait kondisi UMKM, sedangkan pengusaha UMKM belum mampu memberikan informasi yang memadai terkait kondisi usahanya seperti informasi akuntansi.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan pada pendahuluan menunjukkan bahwa implementasi pencatatan laporan keuangan berbasis SAK-ETAP dibutuhkan bagi para pengusaha sektor UMKM. Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif implementasi pencatatan laporan keuangan berbasis SAK-ETAP pada UMKM di bidang jasa sanggar

belajar *Disciple Course* (Dis-co).

Kajian Teori Laporan Keuangan

Setiap perusahaan atau kegiatan bisnis membutuhkan laporan keuangan sebagai informasi data keuangan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam perusahaan tersebut. Menurut Kieso, Weygant & Warfird (2007), laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Munawir (2001), laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data keuangan dan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Jenis-jenis Laporan Keuangan Menurut Kieso, Weygant & Warfield (2007) laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini :

1. Neraca (Balance Sheet) Neraca menyediakan informasi mengenai sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditur, dan ekuitas pemilik dalam sumber daya bersih. Neraca dapat membantu meramalkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian
2. Laporan Laba Rugi (Income Statement) Laporan laba rugi menyediakan informasi yang diperlukan oleh para investor dan kreditur untuk membantu mereka memprediksikan jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian dari arus kas masa depan
3. Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement) Tujuan laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas dari suatu perusahaan selama satu periode.
4. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas merangkum perubahan-perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik selama suatu periode waktu tertentu.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Laporan Keuangan Menurut SAK-ETAP

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) diresmikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 17 Juli 2009 dan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2011. SAK-ETAP merupakan standar akuntansi yang diperuntukkan bagi perusahaan (entitas) yang menggunakan laporan keuangan bagi akuntabilitas publik yang tidak signifikan. Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang menyatakan mematuhi SAK ETAP harus memenuhi semua persyaratan dalam

SAK ETAP. Auditor yang akan melakukan audit di perusahaan yang menganut SAK-ETAP tersebut harus mengacu kepada SAK-ETAP.

Ruang Lingkup SAK-ETAP

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang :

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan.
Berdasarkan poin ini, menunjukkan bahwa SAK-ETAP tidak diberlakukan pada ruang lingkup entitas yang telah terdaftar dan sedang mengajukan pernyataan pendaftaran di pasar modal untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal, kecuali terdapat ijin khusus untuk penggunaan SAK-ETAP. Perusahaan *Go Public* telah memiliki standar tersendiri untuk laporan keuangan yang diwajibkan dari BAPEPAM, yaitu menggunakan SAK-UMUM. SAK-UMUM tersebut telah mengadopsi sebagian dari *International Financial Reporting Standard (IFRS)*.
2. Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*General Purpose Financial Statement*) bagi pengguna eksternal.
Berdasarkan poin ini, menunjukkan bahwa entitas yang telah menerbitkan laporan keuangannya untuk pihak eksternal (Bank, Investor, dan Kreditor) tidak diperkenankan menggunakan SAK-ETAP. Karena, SAK-ETAP terlalu sederhana jika digunakan untuk perusahaan *Go Public* oleh karena itu, laporan keuangan bagi perusahaan *Go Public* diwajibkan menggunakan SAK-UMUM yang nantinya laporan keuangan tersebut setara dengan Standar Internasional (*IFRS*).

Karakteristik SAK-ETAP

SAK-ETAP memiliki beberapa karakteristik diantaranya adalah sebagai berikut :

1. berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK-UMUM,
2. menggunakan *historical cost*,
3. hanya mengatur transaksi umum yang terjadi pada ETAP, lebih sederhana,
4. tidak berubah dalam beberapa tahun kedepan.

Manfaat SAK ETAP

Ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh UKM dalam menerapkan SAK-ETAP antara lain :

1. UKM dapat menyusun laporan keuangan sendiri dan dapat diaudit serta mendapat opini audit yang nantinya akan digunakan untuk memperoleh pinjaman dana dari pihak eksternal (bank).
2. SAK-ETAP lebih sederhana dalam implementasinya dibanding PSAK-IFRS (SAK- UMUM).
3. Meskipun lebih sederhana, namun SAK-ETAP ini tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

Faktor Penyebab Pelaku Bisnis Kecil Menengah Kurang Menerapkan SAK-ETAP

Penyebab pelaku bisnis kecil menengah kurang menerapkan SAK-ETAP yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi tentang SAK-ETAP. Sehingga pelaku bisnis kecil menengah masih takut untuk menggunakan SAK-ETAP karena tidak mau mengambil resiko untuk mengubah semua tatanan keuangan yang sudah ada.
2. Pelaku bisnis menganggap bahwa menerapkan atau tidak, tidak akan berpengaruh pada usahanya karena laporan keuangan yang dibuat hanya untuk kalangan pribadi.
3. Diperlukan biaya yang mahal untuk mendapatkan karyawan yang terlatih.
4. Oleh karena itu, sampai saat ini masih banyak UKM belum menerapkan SAK-ETAP dalam penyajian laporan keuangannya.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sedangkan, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tujuan dari UMKM adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Kriteria UMKM

UU No 20 Tahun 2008 lebih lanjut menerangkan mengenai kriteria UMKM yakni Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek dari penelitian ini adalah Sanggar Belajar *Disciple Course* (Dis- Co) yang berlokasi di Jl. Tosaren II No. 12 Kediri, Jawa Timur. Sumber data yang dibutuhkan berupa data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, selain itu data sekunder berupa dokumen yang berkaitan seperti nota, catatan transaksi, pembukuan keuangan, struktur organisasi dan *jobdesk*. Teknik pengambilan data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yakni pemilik Sanggar Belajar *Disciple Course* dan melakukan observasi terhadap bidang kajian yang berkaitan dengan penelitian, antara lain operasionalisasi usaha, pencatatan laporan keuangan, serta mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan tahap analisis kualitatif Miles dan Huberman (1992) meliputi reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data (reduksi data) yang berkaitan dengan objek penelitian. Berikut disajikan deskripsi objek penelitian yakni Sanggar Belajar *Disciple Course* (Dis-co).

Profil Dis-Co

Sanggar Belajar *Disciple Course* (Dis-Co) merupakan usaha bimbingan belajar untuk siswa SD, SMP, SMA yang didirikan sejak tahun 2003. Dis-Co adalah usaha milik perseorangan dengan SK Ijin Pendirian 503/0666/419.64/2015 dari Departemen Pendidikan Kota Kediri pada tahun 2015. Asal mula nama *Disciple Course* diambil dari kata *Disciple* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pemuridan atau dalam arti luas diartikan sebagai disiplin atau taat sebagai murid. Sehingga pemilik usaha memiliki harapan bahwa peserta didik di Sanggar Belajar Dis-Co memiliki kedisiplinan dan ketaatan sebagai murid. Visi Dis-Co adalah menyelenggarakan pendidikan pra sekolah, tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang profesional, unggul dan bermutu sebagai wujud tanggung jawab pendidikan di Indonesia. Misi Dis-Co adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dalam upaya ikut serta mencerdaskan bangsa melalui bidang pendidikan baik formal maupun non formal yang memiliki sifat unggul dan bermutu. Tujuan Dis-Co meliputi:

1. Mendirikan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal dalam rangka membantu pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Menyelenggarakan satuan pendidikan yang dapat bersaing di bawah

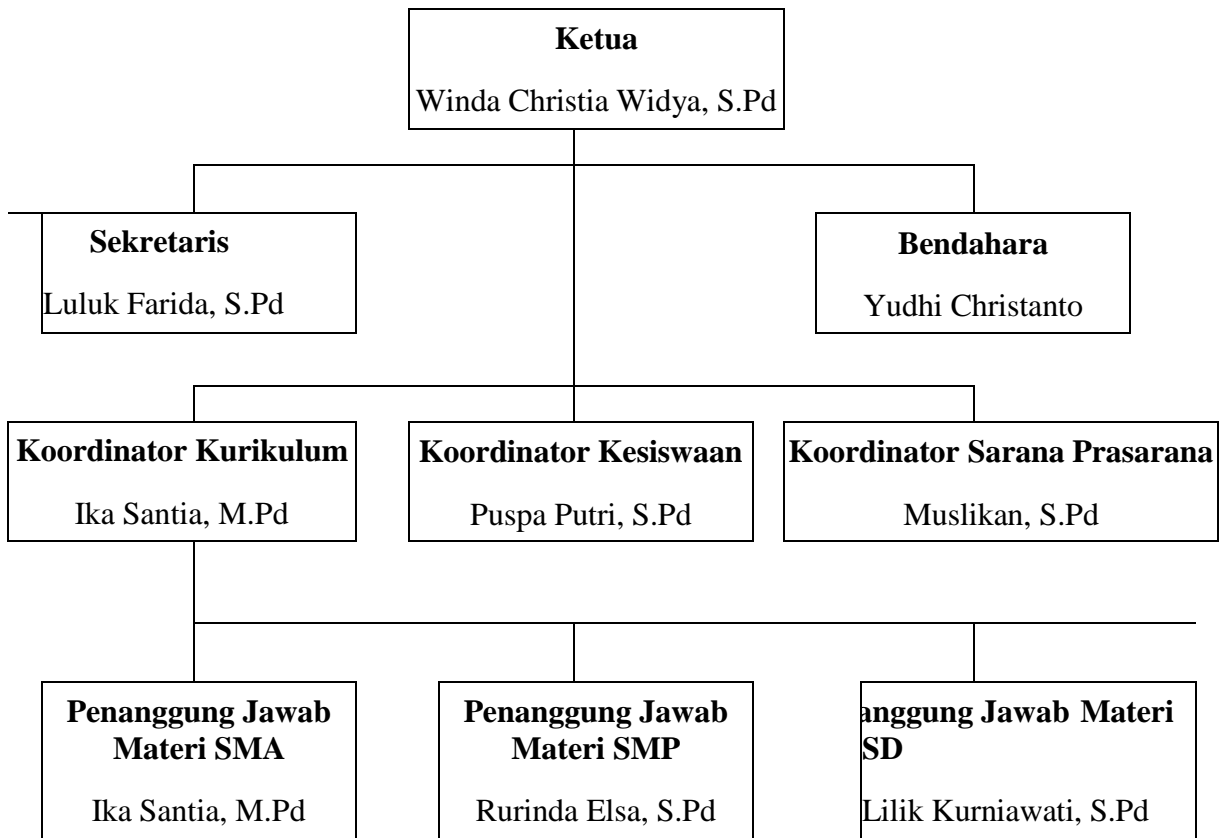
-
-
- Departemen Pendidikan, Departemen Agama ataupun Departemen lain
3. Memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang menunjang dalam pelaksanaan operasionalisasi pendidikan
 4. Ikut berperan erta dalam upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia untuk menghadapi tantangan hidup dalam era globalisasi yang penuh dengan kompetisi
 5. Mengadakan kerjasama dengan lembaga dan atau yayasan lain yang memiliki visi yang sama dengan asa tidak saling merugikan

Dis-Co memiliki 8 guru pengajar tetap yang terbagi untuk mata pelajaran IPA, IPS, Matematika dan Bahasa Inggris. Jumlah rata-rata siswa Dis-Co berjumlah 200 siswa dengan sebaran siswa SD sebesar 10%, SMP sebesar 45% dan SMA sebesar 45%. Fasilitas ruang kelas terdiri dari 5 kelas yang dibagi menjadi 4 shift dimulai dari pukul 14.00 WIB hingga 21.00 WIB dengan durasi 1 jam 30 menit setiap kali pertemuan. Rasio guru dan murid sangat baik, yakni 1:10 dibagi dalam kelompok sesuai dengan kelas (jenjang) masing-masing siswa. Setiap ruang kelas difasilitasi dengan papan tulis (whiteboard), bangku dan kipas angin. Bangunan Dis-Co masih dilakukan dengan sewa, sehingga fasilitas kelas kurang memadai. Fasilitas lain selain ruang kelas yaitu materi-materi dan soal-soal latihan yang telah disesuaikan dengan kesulitan belajar siswa. Diungkapkan oleh pemilik Dis-Co, “...sanggar belajar ini memiliki motto membantu kesulitan belajar siswa. Jadi diawal pembelajaran siswa selalu ditanya apa ada masalah atau tugas yang perlu dipecahkan dari sekolah, setelah masalah teratasi, baru diberikan materi dan pengembangan soal-soal yang berasal dari buku siswa ataupun modul dari sanggar belajar.”

Demi mewujudkan visi, misi dan tujuan Dis-Co, dalam perekrutan guru-guru dilakukan secara profesional yakni melalui test tulis yakni menyelesaikan soal-soal terkait bidang keahlian dan test non tulis seperti penyampaian materi saat di kelas. Evaluasi guru dilakukan setiap 6 bulan sekali di akhir semester. Hal ini dilakukan senantiasa untuk mempertahankan mutu dan kualitas kegiatan belajar mengajar Dis-Co sesuai kebutuhan peserta didik.

Struktur organisasi dan uraian tugas Dis-Co

Struktur Organisasi dan Uraian Tugas



Sumber: Dis-Co (2015)

Tabel 1.1 Uraian Tugas Sanggar Belajar Disciple Course

| Jabatan | Uraian Tugas |
|-----------------------------|--|
| Ketua | Bertanggung jawab terhadap segala hal yang terjadi Bimbingan Belajar |
| Sekretaris | Membuat dan menerima surat yang masuk dan keluar pada Bimbingan Belajar |
| Bendahara | Membuat anggaran, menerima pembayaran serta mengelola uang yang masuk pada Bimbingan Belajar |
| Koordinator Kurikulum | Mengkoordinasi Persiapan Bahan Ajar |
| Koordinator Kesiswaan | Mengkoordinasi segalan urusan yang berkenaan dengan siswa Bimbingan Belajar |
| Koordinator SarPras | Mengkoordinasi segala pengadaan fasilitas yang berhubungan dengan Bimbingan Belajar |
| Penanggung Jawab Materi SMA | Mempersiapkan bahan ajar SMA |
| Penanggung Jawab Materi SMP | Mempersiapkan bahan ajar SMP |
| Penanggung Jawab Materi SD | Mempersiapkan bahan ajar SD |

Sumber: Dis-Co (2015)

Pencatatan Laporan Keuangan Dis-Co

Sistem pencatatan keuangan Dis-Co masih dilakukan secara sederhana, hal ini diungkapkan oleh pemilik Dis-Co sekaligus menjabat sebagai ketua. Pencatatan keuangan dilakukan sebatas pencatatan arus kas masuk dan arus kas keluar. Pembayaran jasa oleh peserta didik yang terjadi diakui sebagai pendapatan jasa dan pengeluaran diakui sebagai pembelian, biaya dan beban. Berikut adalah dokumen pencatatan keuangan sederhana yang dimiliki oleh Dis-Co:



Laporan Arus Kas Sanggar Belajar Disciple Course Bulan Desember 2015

| Arus Kas Masuk | | |
|------------------------------|---------|---------|
| Pendapatan Jasa | XXX | |
| Pelunasan Piutang | XXX (+) | |
| Total Arus Kas Masuk | | XXX |
| Arus kas Keluar | | |
| Pembelian Peralatan Kantor | XXX | |
| Piutang | XXX | |
| Beban Gaji | XXX | |
| Beban Sewa Bangunan | XXX | |
| Biaya Listrik | XXX | |
| Biaya lain-lain | XXX (+) | |
| Total Arus kas Keluar | | XXX (-) |
| Total Arus Kas Bersih | | XXX |

Sumber : Dis-Co (2015)

Berdasarkan pencatatan arus kas masuk Dis-Co, pendapatan jasa merupakan pendapatan yang diperoleh dari pembayaran jasa bimbingan belajar peserta didik, pembayaran dilakukan setiap bulan dimulai dari tanggal 1 hingga tanggal 10 setiap bulannya. Peserta didik yang belum melunasi pembayaran dimasukkan sebagai piutang dalam arus kas keluar, dan pendapatan dari pembayaran piutang diakui sebagai pelunasan piutang. Pada arus kas keluar terdiri dari pembelian peralatan kantor seperti spidol, tinta, kertas dan peralatan lainnya, beban gaji merupakan pembayaran bagi guru Dis-Co yang dihitung berdasarkan jumlah tatap muka per kelas setiap bulan dikalikan nominal honor, beban sewa bangunan merupakan pembayaran yang dikeluarkan untuk membayar sewa bangunan Dis-Co setiap bulan, biaya listrik, biaya lain-lain seperti biaya fotokopi soal-soal latihan, modul atau bahan ajar. Biaya lain-lain juga termasuk pembelian hadiah bagi peserta didik yang berprestasi. Peserta didik

yang selama 10 (sepuluh) kali mendapatkan nilai diatas 80 (selapan puluh) dalam ujian harian, ujian tengah semester maupun ujian semester dengan mata pelajaran yang sama akan mendapatkan hadiah. Hadiah tersebut berupa peralatan tulis. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan stimulasi bagi peserta didik untuk rajin belajar.

Pencatatan arus kas dilakukan secara rutin setiap bulan, sedangkan transaksi harian dimasukkan dalam buku harian pendapatan dan pengeluaran yang kemudian diringkaskan dalam pencatatan arus kas. Pendapatan usaha diperoleh dari pembayaran jasa bimbingan dari peserta didik yang dijabarkan dalam tabel berikut:



SANGGAR BELAJAR "DIS-CO"
DISCIPLE COURSE – be excellent!
Nomor Izin: 503/0666/419,64/2015
Jalan Tosaren II No. 11 Kediri, 0812 3402 336, 0857-0673.6263

**Ringkasan Penerimaan Pembayaran Jasa
Sanggar Belajar Disciple Course
Semester Ganjil 2015/16**

| Nama | Kelas | Bulan | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | Agst | Sep | Okt | Nov | Des | Jan |
| Anna | SMA/12 | XXX/XX | XXX/XX | XXX/XX | XXX/XX | XXX/XX | XXX/XX |
| Ahief | SMA/11 | XXX/XX | XXX/XX | XXX/XX | XXX/XX | XXX/XX | XXX/XX |
| Febri | SMA/10 | XXX/XX | XXX/XX | XXX/XX | XXX/XX | XXX/XX | XXX/XX |
| Yahya | SMP/9 | XXX/XX | XXX/XX | XXX/XX | XXX/XX | XXX/XX | |
| Nabila | SMP/8 | XXX/XX | XXX/XX | XXX/XX | XXX/XX | XXX/XX | |
| Marvel | SMP/7 | XXX/XX | XXX/XX | XXX/XX | XXX/XX | XXX/XX | |
| Jovan | SD/6 | XXX/XX | XXX/XX | XXX/XX | XXX/XX | XXX/XX | |
| Jumlah | | | | | | | |

*XXX = Jumlah Nominal Bayar

**XX = Tanggal Pembayaran

Sumber: Dis-Co (2015)

Pembayaran gaji guru didasarkan jumlah tatap muka setiap kelas yang diajar dikalikan nominal honor, dijabarkan pada tabel berikut ini:



SANGGAR BELAJAR "DIS-CO"
DISCIPLE COURSE – be excellent!
Nomor Izin: 303.0666/419.64/2015
Jalan Yosari II No. 11 Kediri, 0812 3402 336, 0857 0673 8261

Nama : Winda
Mata Pelajaran/Kelas : Bahasa Inggris : SMP
Bulan/Tahun : Desember / 2015

| Kelas | Tatap Muka ke- | | | | | | | | | Total |
|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| SMP/A | V | V | V | V | V | V | V | V | X | 8 pertemuan |
| SMP/B | V | V | V | V | V | V | V | X | X | 7 pertemuan |

Sumber: Dis-Co (2015)

Berdasarkan uraian dari pencatatan keuangan yang telah dilakukan Dis-Co maka pada dasarnya karakteristik SAK-ETAP telah dilakukan oleh Dis-Co yakni pencatatan keuangan telah menggunakan historical cost, mengatur transaksi umum yang lebih sederhana dan tidak berubah selama beberapa tahun belakang hingga beberapa tahun ke depan. Namun, pencatatan tersebut masih jauh dari SAK-ETAP yang melaporkan informasi keuangan secara lengkap yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, arus kas, plaporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Dis-Co hanya melakukan pencatatan arus kas.

Menurut pemilik Dis-Co, pencatatan keuangan secara lengkap belum dilakukan karena minimnya pengetahuan mengenai pencatatan keuangan secara lengkap, sehingga hanya dilakukan secara sederhana. Namun, kesadaran pemilik usaha akan pentingnya pencatatan keuangan sudah dirasakan sejak pendirian Dis-Co. Aktivitas pencatatan keuangan memang sangat membantu pemilik usaha untuk menganalisis kondisi keuangannya. Pemilik usaha dapat memantau efektifitas dan efisiensi pengeluaran yang dilakukan sehingga mampu meningkatkan pendapatan bersih usahanya. Penyebab belum terlaksananya implementasi SAK-ETAP pada sanggar belajar Dis-Co ini disebabkan pemilik usaha yang belum tahu tentang bentuk-bentuk laporan keuangan yang seharusnya ada serta kegunaan fungsi dan manfaat pencatatan laporan keuangan berbasis SAK-ETAP bagi pihak eksternal usaha. Selain dari pihak internal, belum terlaksananya implementasi pencatatan keuangan berbasis SAK-ETAP karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah, khususnya pembina UMKM tentang kajian akuntabilitas UMKM.

Demi mewujudkan perekonomian yang mandiri untuk memperkuat permodalan nasional maka UMKM perlu didukung oleh semua pihak baik pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan UMKM, perusahaan-perusahaan Swasta Nasional, BUMN dan perbankan untuk ber partisipasi mengembangkan UMKM. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pelatihan pembuatan laporan keuangan, pemberian modal berupa kredit dan mitra binaan. Hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu tentang keterbatasan UMKM untuk mengimplementasikan pencatatan keuangan berbasis SAK-ETAP menurut Rodhiyah (2012) disebabkan oleh aspek akuntabilitas, penyusunan laporan keuangan berupa pencatatan keuangan dilakukan secara sederhana dan belum mengikuti sistem akuntansi karena pengetahuan tentang pembukuan relatif kurang, tidak ada waktu, tidak ada tenaga dan merasa sulit serta rumit. Pencatatan keuangan yang dilakukan belum dapat di pakai sebagai laporan kinerja keuangan ,akibatnya tidak bisa di gunakan untuk memprediksi kegiatan usaha maupun sebagai pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait antara lain pihak perbankan, supplier,maupun pemerintah kerkaitan dengan pajak. Keterlibatan pemerintah juga sangat diperlukan dalam hal ini, seperti penelitian yang telah dilakukan Andriani (2014) yang memaparkan bahwa regulasi pemerintah yang mengeluarkan PP No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan memberikan kemudahan yang diberikan para *stakeholder* kepada UMKM mengakibatkan implementasi SAK-ETAP berjalan lamban, sehingga diperlukan unsur keharusan dalam implementasi SAK-ETAP demi terwujudnya pengelolaan keuangan yang profesional dan berdaya saing.

Kesimpulan dan Saran Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapa disimpulkan bahwa Dis-Co belum menerapkan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP. Pencatatan keuangan masih dilakukan secara sederhana yaitu menuliskan pendapatan dari hasil pembayaran uang jasa bimbingan belajar oleh siswa dan pengeluaran berupa beban dan biaya-biaya pada buku besar yang ditulis secara manual. Kendala yang dialami oleh pemilik usaha dalam menerapkan pencatatan keuangan berbasis SAK-ETAP dilatarbelakangi beberapa faktor internal dan eksternal. Kendala faktor internal merupakan kendala yang timbul dari internal Dis-Co, antara lain kurangnya pengetahuan mencatat laporan keuangan secara lengkap, kurangnya pengetahuan pemilik usaha mengenai tujuan dan manfaat pencatatan keuangan berbasis SAK-ETAP dan terbatasnya pengetahuan pemilik usaha mengenai tujuan laporan keuangan yang dibuat hanya sebagai informasi pribadi pengelola Dis-Co. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan tidak terlaksananya implementasi pencatatan keuangan berbasis SAK-ETAP adalah minimnya pemerintah terutama pembina UMKM untuk mensosialisasikan dan melatih para penggiat UMKM terkait hal tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka saran yang dapat direkomendasikan peneliti adalah dengan menumbuhkan kebiasaan para

pelaku UMKM untuk membuat catatan keuangan sesuai SAK-ETAP sehingga dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban kepada para stakeholder yang membutuhkan. Perlu ada fasilitas dan komunikasi pembina UMKM berkaitan hal tersebut untuk melakukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme UMKM khususnya dibidang manajemen keuangan.

Daftar Pustaka

- Andriani, Lilya; Anantawikrama Tungga Atmaja; Ni Kadek Sinarwati. 2014. Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). E-Journal: Universitas Pendidikan Ganesha Vol 2. No. 1
- Baas, Timo dan Mechthild Schrooten. (2006). Relationship Banking and SMEs : A Theoretical Analysis. Small Business Economic Vol 27.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2007. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Kieso, Weygant, Warfield. 2007. *Intermediate Accounting, Twelfth Edition*, Erlangga, Jakarta.
- Rodhiyah. 2012. Kajian Tentang Akuntabilitas Usaha Kecil Menengah Melalui Laporan Keuangan (Studi Kasus pada UKM Konveksi di Semarang). Forum: Majalah Pengembangan Ilmu Sosial, 40(2). ISSN 01260731
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah